



PRIORITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA

DADANG KURNIA, Ak., MBA,CA, CGAP, QIA, CFRA, ASEAN CPA , CGCAE

DEPUTI KEPALA BPKP

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



Innovative – Delivered – Effective – Accountable



OUTLINE MATERI

- AREA PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

- ARAHAN PRESIDEN DALAM RAKORNASWASIN TAHUN 2021

- AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN (APP) dan AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH (APPD) 2021

- PENGAWASAN PENERIMAAN DAERAH

- PENGAWASAN EFEKTIVITAS PENGELOUARAN DAERAH

- PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI DAERAH

- PENGAWASAN PROGRAM PRIORITAS DI DAERAH

- TRANSFORMASI SPIP TERINTEGRASI DAN PK APIP

- SINERGI DAN KOLABORASI PENGAWASAN

AREA PENGAWASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI DAERAH

Pemerintah Pusat



APBN

Belanja K/L

Belanja Pusat di Pusat

Belanja Pusat di Daerah

Belanja Transfer

Dana Perimbangan

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Transfer Lainnya

Dana Desa

RPJMN/RKP



RPJMD/RKPD

Pemerintah Daerah

PINA/KPBU



APBD

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Strategis Nasional (PSN)

LINTAS SEKTORAL

PINA/KPBU

Pendapatan

Pendapatan Transfer

Optimalisasi PAD

Kerja Sama Daerah

Pembentukan

Pinjaman Daerah

Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja Modal

Belanja Transfer

Belanja Hibah

Belanja Bansos

Belanja

DAU

DBH

DAK

Kebendaharaan
Umum
Negara
dan Fiskal

Desa

Three Lines Model

SPIP Terintegrasi

APIP

Dukungan SIM
Daerah

Dukungan SDM
Daerah

KESEJAHTERAAN RAKYAT

**5 ARAHAN PRESIDEN
7 AGENDA PEMBANGUNAN**

LINGKUNGAN STRATEGIS

01. UU No 33/2004 ttg Perimbangan..
02. UU No 06/2014 ttg Desa
03. UU NO 23/2014 ttg Pemda
04. UU No 11/2020 ttg Cipta Kerja & Turunannya
05. PP No 60/2008
06. PP No 08/2016 ttg Dana Desa
07. PP No 12/2017 ttg Binwas...
08. PP No 11/2019 Perub PP43/2014
09. PP No 12/2019 ttg Peng Keuda
10. PP No 72/2019 ttg Perangkat...

PINA = Pembentukan Investasi Non Anggaran

KPBU = Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

ARAHAN PRESIDEN DALAM RAKORNASWASIN TAHUN 2021

“Saya minta **BPKP** dan seluruh **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** melihat betul, mencari **penyebab** lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa. Memberikan **solusi**, carikan solusinya. Menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan **cepat** dan **akuntabel**.”



**RAKORNAS
WASIN 2021**
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

“Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar **BPKP** dan **APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal** dari hulu, sejak awal pada saat **perencanaan** terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekedar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini.”

APP PUSAT 2021



APP DAERAH 2021



- 1 Aceh**
 - Dana Otsus
 - Pengelolaan Dana Baitul Mall
- 2 Sumut**
 - Tata Kelola Danau Toba
 - Pembangunan Sport Center
- 3 Sumbar**
 - Program Lumbung Beras
 - Pengembangan Geopark
- 4 Riau**
 - Peralihan Blok Rokan
 - Penanganan Kebakaran Hutan
- 5 Jambi**
 - Karhutla Jambi
 - Evaluasi PETI Jambi
- 6 Bengkulu**
 - KEK Pulau Baai
 - Program Kartu Bengkulu Sejahtera
- 7 Sumsel**
 - POPNAS 2021
 - Pengembangan Kawasan Terpadu
- 8 Lampung**
 - Program Kartu Petani
 - Program Kawasan Terintegrasi
- 9 DKI Jakarta**
 - Penyediaan Rumah DP 0
 - Reviu Tata Kelola Jak-lingko
- 10 Jawa Barat**
 - Pengadaan dan Distribusi Vaksin
- 11 Jawa Tengah**
 - Pengembangan Industri Terpadu batang
 - Tata Kelola Produksi Gula
- 12 Yogyakarta**
 - Dana Keistimewaan u/ Program Desa Mandiri
 - Pariwisata Super Prioritas

- 13 Jawa Timur**
 - Percepatan pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru
 - Dukungan Program Ketahanan Pangan
- 14 Kalimantan Barat**
 - Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - Percepatan pembangunan kawasan industri
- 15 Kalimantan Tengah**
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
 - Program Restorasi Gambut
- 16 Kalimantan Selatan**
 - Pengelolaan Lahan Kritis
 - Peralatan Bencana Kebakaran Hutan
- 17 Kalimantan Timur**
 - Konektivitas Pendukung Ibukota Baru
 - Pengelolaan Perijinan Tambang
- 18 Sulawesi Utara**
 - Pendukung Destinasi Wisata Super Prioritas
 - KEK Bitung
- 19 Sulawesi Tengah**
 - Rehab Pasca Bencana
 - Program Parimo Khatulistiwa
- 20 Sulawesi Tenggara**
 - Kawasan Pariwisata Toronipa
 - Industri Agrobisnis
- 21 Sulawesi Selatan**
 - Kawasan Khusus dan Bisnis Central
 - Pendukung Jalur Kereta API
- 22 Bali**
 - Pusat Budaya Bali
 - Kawasan Nusa Penida
- 23 NTB**
 - KEK Mandalika
 - Kawasan Industri Sumbawa
- 24 NTT**
 - Wisata Labuan Bajo
 - Food Estate Sumba
- 25 Maluku**
 - Lumbung Ikan Nasional
 - Lapangan Abadi Wilayah
- 26 Papua**
 - Dana Otsus
 - PON XX dan Peparnas XVI
- 27 Papua Barat**
 - Dana Otsus
 - Bandara Rendani Manokwari
- 28 Kepri**
 - SDA di Laut Kepri
 - KEK Wilayah Kepri
- 29 Bangka Belitung**
 - Geopark Belitung
 - Industri Tanjung Ular
- 30 Banten**
 - Koridor Jalan Boru-Cikeusal
 - Ketahanan Pangan Prov Banten
- 31 Gorontalo**
 - Program Kesejahteraan Petani
 - Hasil dan Pemasaran Perikanan
- 32 Sulawesi barat**
 - Penanggulangan Benacana Sulbar
 - Program Mandiri Cerdas, Sehat
- 33 Maluku Utara**
 - Lumbung Ikan Nasional
 - KEK Morotai
- 34 Kalimantan Utara**
 - Kota Baru Mandiri
 - Program Budidaya Rumput Laut

67 PENGAWASAN Tematik

Keterangan : Sudah dilaksanakan

REALISASI PAD 2018 - 2021 (NASIONAL)

● TAHUN 2018	Rp 269,90 T
● TAHUN 2019	Rp 295,52 T
● TAHUN 2020	Rp 231,59 T
● TAHUN 2021 (Semester I)	Rp 94,26 T -18,60 % *)

Sumber Data : DJPK Kemenkeu

*) : Asumsi realisasi penerimaan semester I 2020
sama dengan semester II 2020

FOKUS PENGAWASAN OPAD :

● Upaya Ekstensi Penerimaan PAD

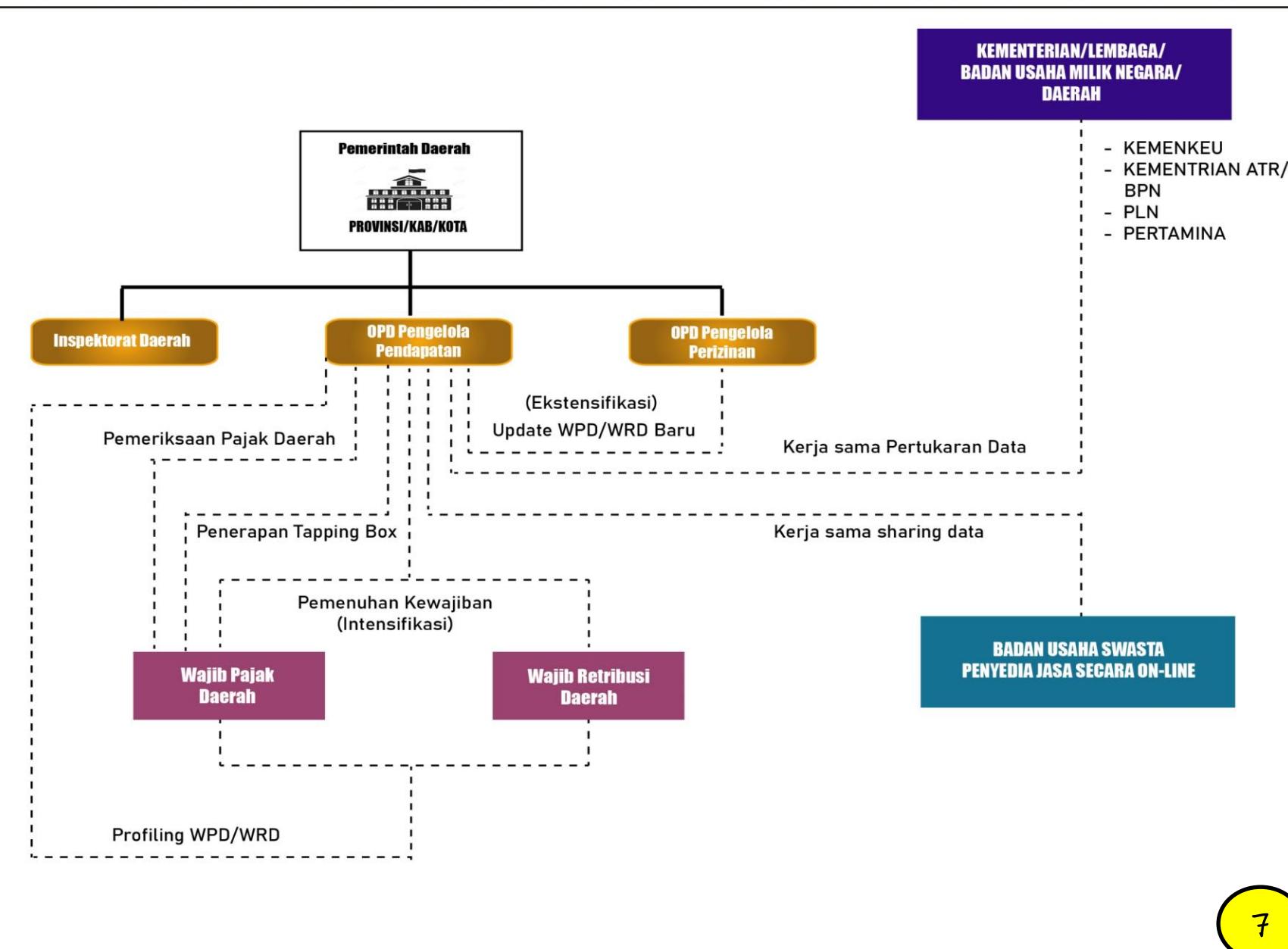
- ✓ Potensi jenis pajak/retribusi baru
- ✓ Potensi Wajib Pajak/Retribusi Daerah Baru

● Upaya Intensifikasi Penerimaan PAD

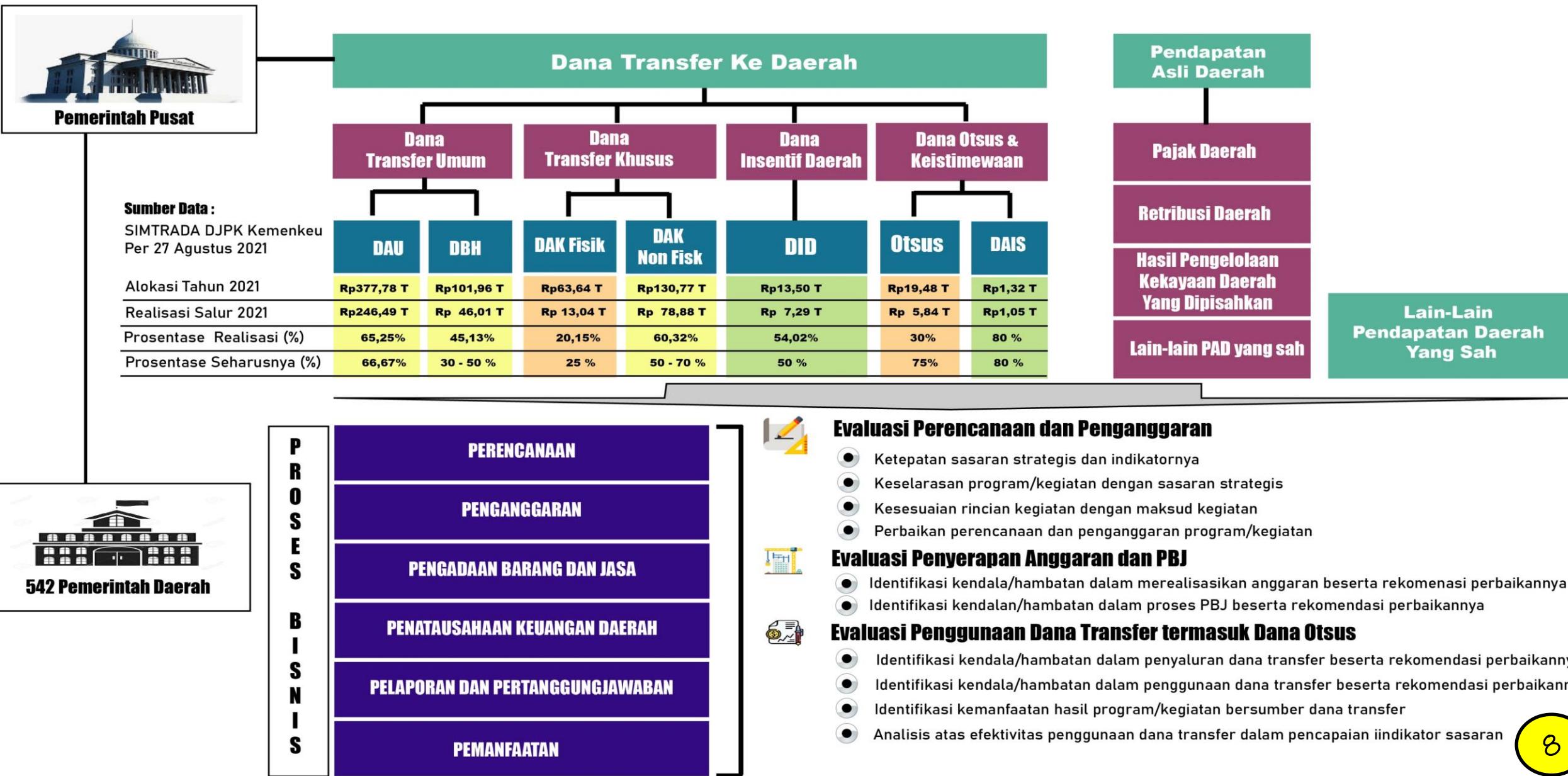
- ✓ Kerja sama pertukaran data dgn K/L/BU
- ✓ Kerja sama sharing data dgn BU Swasta
- ✓ Penerapan Tapping Box
- ✓ Penyusunan Profiling WP/WRD
- ✓ Pemeriksaan Pajak Daerah

KEMENTERIAN/LEMBAGA/
BADAN USAHA MILIK NEGARA/
DAERAH

- KEMENKEU
- KEMENTRIAN ATR/
BPN
- PLN
- PERTAMINA



PENGAWASAN EFEKTIVITAS PENGELOUARAN DAERAH



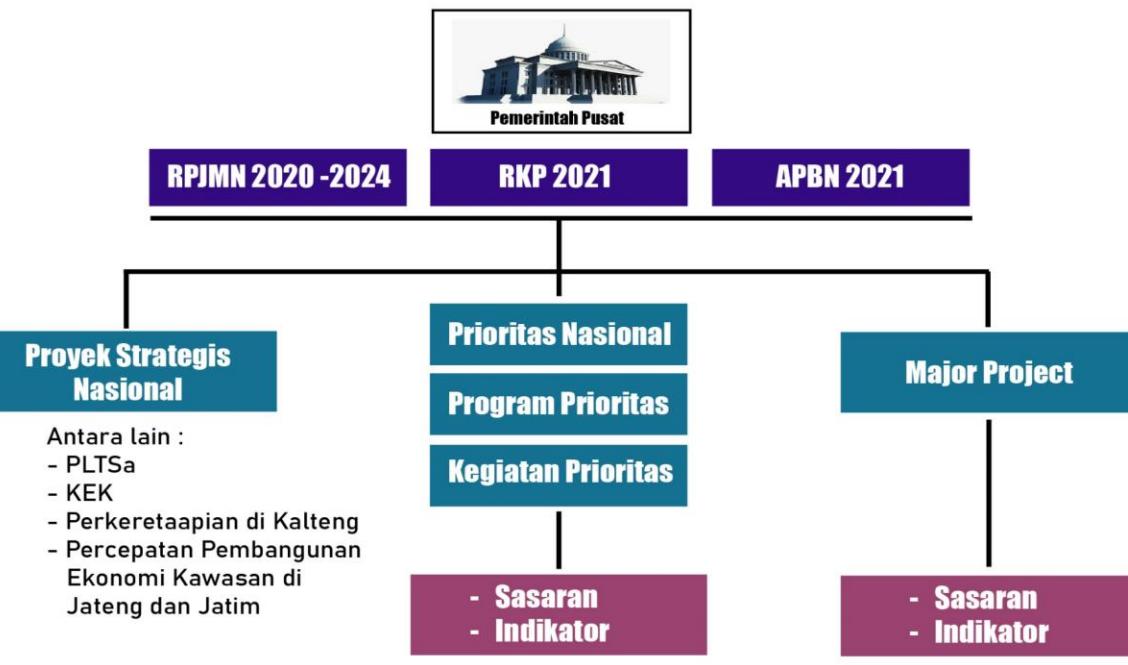
Fokus Pengawasan

- Meyakinkan dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), beserta Major Project dan Proyek Strategis Nasional



Dukungan Pemda Terhadap PSN

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Persiapan Proyek | <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Tata TKDN |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Penyediaan Lahan | <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Pembagunan Fisik |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Tata Ruang | <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Pengendalian Proyek |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Pendanaan Proyek | <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Regulasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Jaminan Pemerintah | <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Cipta Kerja |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Perijinan | <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Pemanfaatan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspek Pelaksanaan PBJ | |



Proyek Strategis Nasional

Antara lain :

- PLTSa
- KEK
- Perkeretaapian di Kalteng
- Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jateng dan Jatim

Dukungan Pemda Terhadap PN, PP, KP & MP

Aspek Kebijakan

Keberadaan, kecukupan dan ketepatan kebijakan pemda dalam mendukung pencapaian target sasaran PN, PP, KP dan MP

Aspek Kelembagaan

Keberadaan dan berfungsinya organ pelaksana dukungan pemda terhadap PN, PP, KP dan MP

Aspek Perencanaan

Sinkronisasi target sasaran di pemda beserta OPD-nya dengan target sasaran PN, PP, KP dan MP

Aspek Penganggaran

Keberadaan dan kecukupan alokasi anggaran program/kegiatan dukungan pemda serta kesesuaian dengan standar biaya

Aspek Pelaksanaan

Efektivitas realisasi pelaksanaan program/kegiatan pemda dalam mendukung pencapaian sasaran PN, KP dan MP

Aspek Capaian Hasil

Capaian indikator sasaran PN, PP, KP dan MP di masing-masing daerah

PENGAWASAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH



PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN

Fokus Pengawasan

- Meyakinkan pelaksanaan proses bisnis penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan berjalan lancar dan akuntabilitasnya tetap terjaga

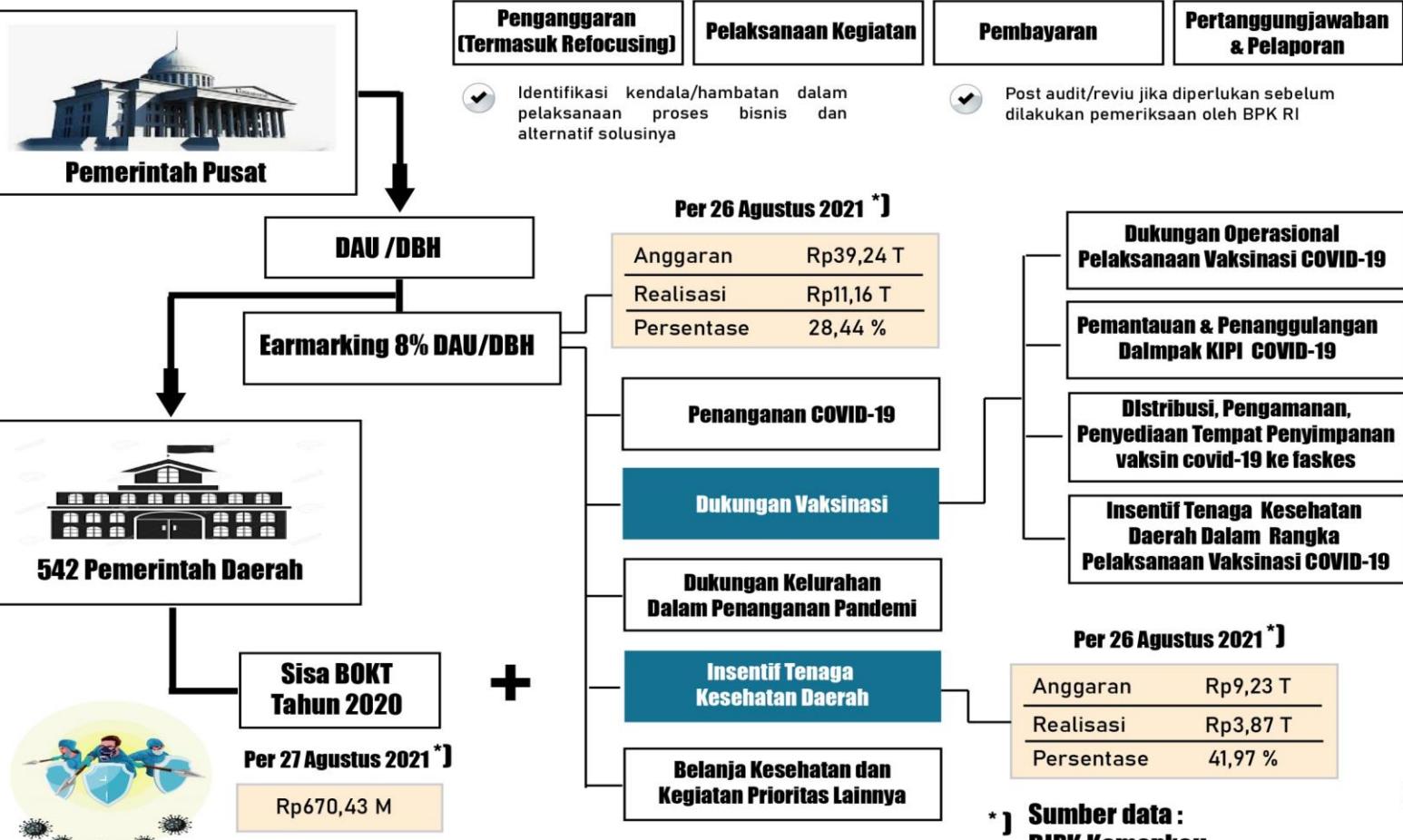
SEB Mendagri dan Menkeu

Nomor 903/4253.A/SJ
 Nomor SE-2/MK 07/2021
 Tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan COVID-19 dan Dampaknya

SEB Mendagri dan Menkes

Nomor 440/4066/SJ
 Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021
 Tentang Percepatan Pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang menangani COVID-19

Proses Bisnis



PENANGANAN LIMBAH B 3 MEDIS COVID - 19



Puskesmas

Pembagian Urusan atas Penanganan Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - UU 23/2014

PEMERINTAH PUSAT

- Pengelolaan B3
- Pengelolaan Limbah B3

PEMERINTAH PROVINSI

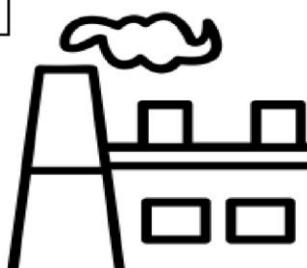
Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

PEMERINTAH KAB/KOTA

- Penyimpanan sementara limbah B3
- Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota

Instruksi Mendagri No 33 Tahun Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis dari Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Fasilitas Isolasi Mandiri



Pengolah limbah



Penyimpanan Sementara



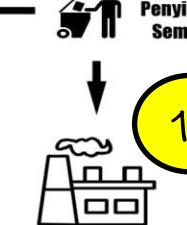
Tempat Isolasi Mandiri Terpusat



Laboratorium Kesehatan Daerah



Rumah Sakit

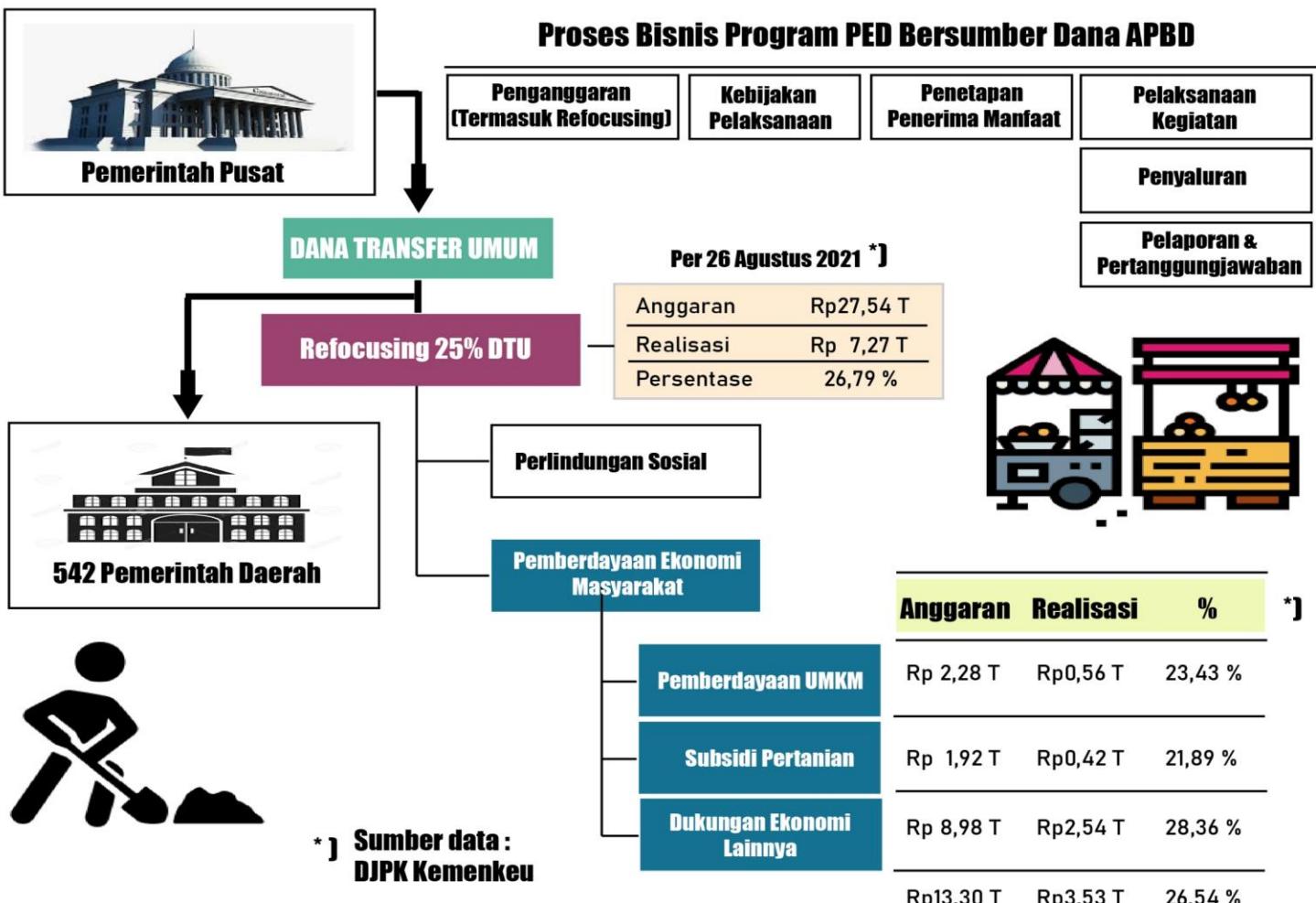


Penyimpanan Sementara

PENGAWASAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH

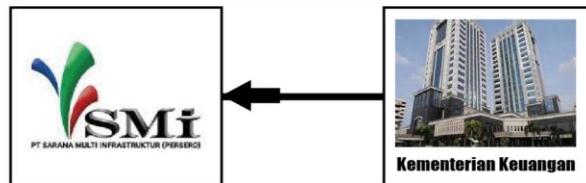
Fokus Pengawasan

- Meyakinkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah
- ✓ Identifikasi kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses bisnis dan alternatif solusinya
- ✓ Analisis capaian hasil dan kemanfaatan dari hasil pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah
- ✓ Post audit/reviu oleh APIP jika diperlukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI



PP No 23 Tahun 2020 beserta perubahannya

Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional



Pinjaman PEN Tahun 2020

Bunga 0 %

Alokasi : Rp 20 T

Realisasi Tandatangan Perjanjian : Rp 19,13 T

Realisasi salur ke Pemda Tahun 2020 : Rp 7,62 T

Tersedia untuk disalurkan Tahun 2021 : Rp 11,51 T

Penyaluran ke Pemda Tahun 2021 : Rp 2,62 T

Total realisasi salur sd 30 Agustus 2021 : Rp 10,24 T

PROSES BISNIS



Pinjaman PEN Tahun 2021

Bunga 5,3 % sd 6,1%

Alokasi : Rp 10 T

Pengajuan usulan pinjaman pada 38 Pemda senilai Rp 15,62 T

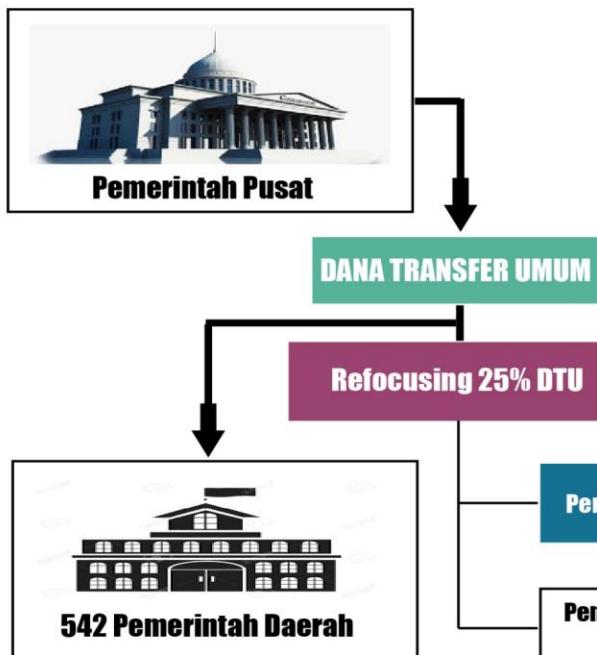
Sd 30 Agustus 2021
Telah ditandatangani pinjaman pada 19 Pemda senilai Rp 5,32 T
Namun belum ada realisasi pencairan

Fokus Pengawasan

- ✓ Ketepatan sasaran
- ✓ Hambatan/kendala penyaluran
- ✓ Perkembangan realisasi penyaluran
- ✓ Ketepatan penyaluran dan penggunaan
- ✓ Analisis pemanfaatan pinjaman PEN Daerah

Fokus Pengawasan

- Meyakinkan pelaksanaan proses bisnis penanganan COVID-19 Bidang Perlindungan Sosial berjalan lancar dan akuntabilitasnya tetap terjaga
- Identifikasi kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses bisnis dan alternatif solusinya.
- Post audit/reviu oleh APIP jika diperlukan sebelum pemeriksaan oleh BPK RI



* Sumber data:
DJKP Kemenkeu

Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Penyediaan Dan Percepatan
Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau
Jaring Pengaman Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah

SEB Mendagri dan Menkeu

Nomor 903/4253.A/SJ
Nomor SE-2/MK 07/2021
Tentang Percepatan Pelaksanaan
Refocusing dan Realokasi APBD
TA 2021 Dalam Rangka Pendanaan
Penanganan COVID-19 dan Dampaknya

Sinkronisasi



Bansos APBN



Proses Bisnis Program Perlinsos Bersumber Dana APBD



Per 26 Agustus 2021 *

Anggaran	Rp27,54 T
Realisasi	Rp 7,27 T
Persentase	26,79 %

Per 26 Agustus 2021 *

Anggaran	Realisasi	%
Rp8,88 T	Rp2,07 T	23,40 %
Rp0,42 T	Rp0,11 T	27,28 %
Rp4,93 T	Rp1,65 T	33,51 %
Rp14,24 T		27,02 %

Hal yang perlu mendapatkan perhatian

- Pemda berkewajiban melakukan update data pada DTKS Kementerian Sosial.
- Penyaluran bansos bersumber dana APBD harus memperhatikan bansos yang bersumber dari pendanaan APBN dan pendanaan lainnya.
- Validitas data penerima manfaat sesuai dengan data NIK dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

(Termasuk BLT-DD, PKTD dan PBJ Desa)

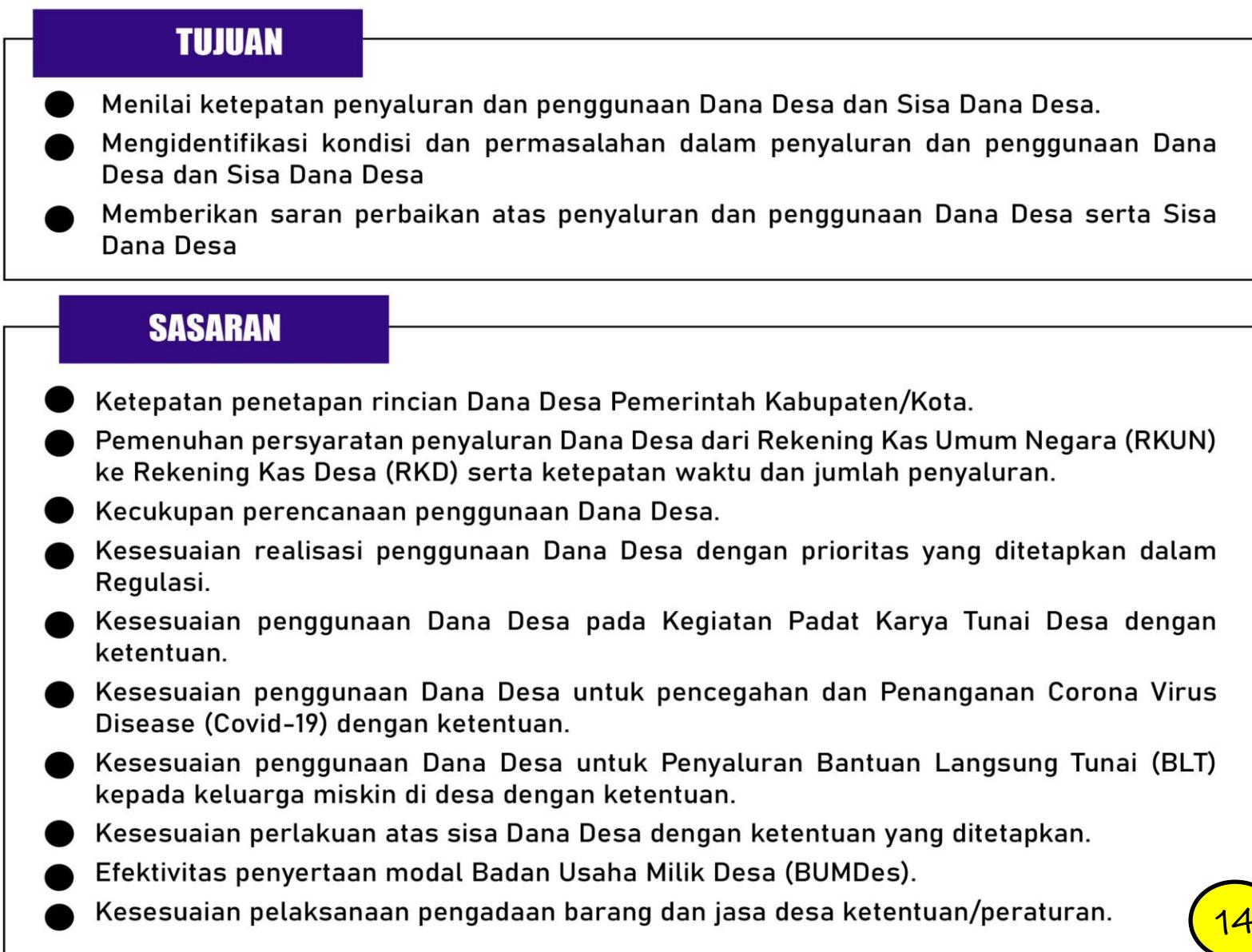
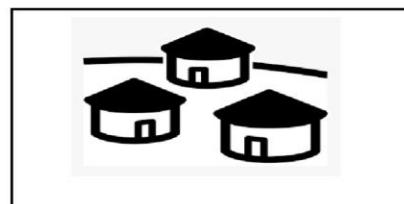


Kebijakan

Alokasi
Sumber Daya



Kebijakan



UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA MELALUI PENETAPAN TARGET LEVEL 3 PADA PENILAIAN SPIP DAN MR INDEKS (MRI) DI RPJMN

Gap antara Target 2021 dengan Baseline/Capaian 2020

SPIP LEVEL ≥ 3

	Jml IP	Baseline (Capaian 2020)	2020	2021	Gap	2022	2023	2024
K/L	3	1	1	2	1	2	3	3
Provinsi	34	27	28	29	2	30	31	31
Kab/Kota	508	280	285	312	32	339	361	383
TOTAL	545	308	314	343	35	371	395	417

MRI LEVEL ≥ 3

	Jml IP	Baseline (Capaian 2020)	2020	2021	Gap	2022	2023	2024
K/L	3	0	1	1	1	2	2	3
Provinsi	34	0	2	5	5	10	14	21
Kab/Kota	508	0	8	48	48	85	133	200
TOTAL	545	0	11	54	54	97	149	224

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan Renstra

Deputi PPKD 2020-2024

*) Baseline merupakan realisasi capaian 2020

**) Jumlah K/L 3 adalah K/L Mitra Deputi PPKD

IMPLEMENTASI
SPIP Terintegrasi
(SPIP dan MRI
dalam satu *tools*
pengukuran)

DIPERLUKAN PEMBINAAN
DAN PENILAIAN
TERINTEGRASI UNTUK
MENDUKUNG PENCAPAIAN
TUJUAN ORGANISASI

KONDISI PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN
SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN
APIP SAMPAI SAAT INI



PENYELENGGARAAN BELUM
SALING TERINTEGRASI

BELUM DIARAHKAN UNTUK
MENGAWAL TUJUAN
ORGANISASI

BELUM TERINTEGRASI
DENGAN PENGENDALIAN
ATAS *FRAUD*

PENILAIAN BELUM
TERINTEGRASI

PENILAIAN BERFOKUS PADA
PEMBERIAN SKOR

PENILAIAN TERKESAN
DOCUMENT BASED

Aol & REKOMENDASI MASIH
PARSIAL

Aol & REKOMENDASI
BELUM DIPANTAU

Kondisi Implementasi Manajemen Risiko
pada Pemerintah Daerah

Penetapan
IKU MRI
18/542
(3,32%)

Struktur
MR
30/542
(5,54%)

Kebijakan
MR*
299/542
(55,17%)

Menyusun
RR
446/542
(82,28%)

Poin Penting Peningkatan Implementasi MR pada Kemendagri,
Kemendesa PDTT, dan BNPP

Kemendagri:
Finalisasi *Draft* dan
Penerbitan
Permendagri MR serta
Implementasinya.

Kemendes PDTT:
Implementasi
Permendesa PDTT
Nomor 9/2020
tentang MR.

BNPP:
Peningkatan Fungsi
APIP untuk
mendorong
Implementasi MR.



TRANSFORMASI SPIP TERINTEGRASI DAN PK APIP

PENETAPAN TUJUAN

Penilaian Kualitas Perencanaan

Sasaran Strategis
K/L/D

Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

STRUKTUR DAN PROSES

Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP)

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN RISIKO

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

MANAJEMEN RISIKO INDEX

IEPK

LEVEL KAPABILITAS APIP

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- undangan

SINERGI DAN KOLABORASI PENGAWASAN



NOTA KESEPAHAMAN
MENTERI DALAM NEGERI DENGAN KEPALA BPKP
TENTANG KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020

PERJANJIAN KERJA SAMA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN
DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
TANGGAL 23 NOVEMBER 2020



NOTA KESEPAKATAN GUBERNUR SELURUH INDONESIA DENGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP
SECARA SEREMPAK TANGGAL 2 DESEMBER 2020



Perjanjian Kerja Sama
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Korupsi Pada Pemerintah Daerah
antara Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelegaraan Keuangan Daerah
dengan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK

Latar Belakang

- PP 72/2019 tentang Perubahan PP No 18/2016 tentang Perangkat Daerah mengamanahkan Kemendagri dalam mensupervisi kepada Inspektorat Daerah atas laporan pengawasan berindikasi penyalahgunaan kewenangan agar melibatkan BPKP .

Ruang Lingkup

- Pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah
Supervisi pengawasan di lingkungan pemda atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah: peer review, coaching clinic, peningkatan kompetensi pemeriksaan investigatif
- Peningkatan Kapabilitas APIP
Kewajiban kepada Kepala Daerah dan Inspektorat dalam mencapai Kapabilitas APIP Level 3 yang berkualitas
- Pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah
 - ✓ Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - ✓ Pengawasan badan usaha milik daerah
 - ✓ Pengawasan keuangan desa

Ruang Lingkup Kerja Sama Mencakup Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada :

- Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah,
- Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,
- Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- Pencegahan dan Penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah,
- Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah
- Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan pada pemerintah daerah dan
- Penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah.

A. PELAKSANAAN SUPERVISI KEGIATAN PENGAWASAN

- Pendidikan dan Pelatihan APIP (Diklat Audit Investigasi sebanyak 16 kelas tahun 2021 dan 14 kelas tahun 2020, serta Diklat PBJ/E-Tender sebanyak 6 kelas tahun 2021 dan 16 kelas tahun 2020)
- Coaching clinic sebanyak 13 penugasan di tahun 2021
- Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan sebanyak 4 penugasan pada tahun 2020/2021
- Audit atas BUMD sebanyak 13 penugasan pada tahun 2020/2021

B. PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

- Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) bagi APIP Daerah
- Pedoman Audit Ketaatan
- Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
- Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
- Panduan Program Kerja Audit Kinerja Tematik Pembangunan Destinasi Pariwisata
- Panduan Program Kerja Audit Kinerja Tematik Ketahanan Pangan
- Panduan Praktis Pemberian Peringatan Dini oleh APIP
- Pelaksanaan Pengawasan PBJ Alat Material Kesehatan (Almatkes) Penanganan Pandemi Covid-19 Bersumber pada Dana APBD
- Ekspose kapabilitas APIP Level 3
- Sertifikasi CGCAE

C. PENGAWALAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Pengawasan APBD
 - ✓ Sosialisasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 - ✓ Persiapan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah
 - ✓ Kerja Sama BPKP dan APIP dalam Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah
- Pengawasan Keuangan Desa
 - ✓ Penerapan SIA BUM Desa (pemantauan dan asistensi pengelolaan keuangan)
 - ✓ Bimtek Siswaskeudes
- Pengawasan BUMD
 - ✓ Evaluasi Kinerja PDAM
 - ✓ Evaluasi Kinerja BUMD Aneka Jasa



TERIMA KASIH

Innovative - Delivered - Effective - Accountable



Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



(021) 85910031
(Hunting)



www.bpkp.go.id



@bpkp_id
@ppkd.bpkp



humasbpkppusat
ppkd.bpkp



BPKPgoid
Deputi Ppkd Bpkp



@BPKPgoid